

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA

A. Pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Berikut pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. h, 28.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan sebagai bagian dari manajemen erat kaitannya dengan fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengorganisasian. Karena itu pelaksanaan akan dapat terlaksana dengan baik bila semua fungsi manajemen juga berjalan baik. mendefinisikan pelaksanaan sebagai berikut : ”Pelaksanaan adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk bertujuan yang nyata”.

Pendapat lain mengemukakan sebagai berikut: “Penggerakkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan

²Undang-Undang No 32 tahun 2004, Tentang pemerintahan otonomi daerah, h.14

dan mengatur segala yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha”.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah upaya mengimplementasikan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan menggerakkan semua anggota organisasi untuk bekerja sama dan secara ikhlas agar menuju pada maksud atau tujuan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan yang telah diutarakan di atas, dalam Eksiklopedi Administrasi dikemukakan pengertian aktivitas pelaksanaan sebagai berikut:

Aktivitas pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang dilaksanakan.³

Dalam penyelenggaraan kegiatan lebih lanjut pelaksanaan akan berkaitan erat dengan aktivitas pembimbingan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengambilan keputusan (*decision making*).Kemudian, kaitan dengan pembimbingan (*directing*).

“Seorang pemimpin dalam melakukan pembimbingan (*directing*), berarti harus mampu dan selalu membangkitkan serta memelihara semangat kerja bawahannya, memberikan perintah-perintah, penugasan-penugasan,

³Melayu S. P. Hasibuan, manajemen sumberdaya manusia, dasar dan kunci keberhasilan. 2000.h.25.

pengarahan dan memberikan tuntunan serta pembinaan bagi bawahan agar mereka melakukan pekerjaan dalam usaha mencapai tujuan.”

“Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat”.

“Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara”. Pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.⁴

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana atau ahli tentang pembangunan desa tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

⁴Irwan M suparmoko, Ekonomi Pembangunan Desa, (Duta Aksara, Jakarta) 2002 h.12.

pembangunan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat baik dalam bentuk material maupun spiritual atau dengan kata lain adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Sedangkan pelaksanaannya dapat berhasil dengan optimal apabila dengan sejumlah aset, potensi, dan kekayaan yang ada dapat dipadukan sehingga merupakan kesatuan gabungan yang strategis. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu berhasilnya pembangunan Desa.

Oleh karena itu pembangunan Desa dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun bentuk-bentuk organisasi pembangunan desa harus menggunakan sistem dan prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Partisipasi masyarakat desa dalam konteks ini adalah termasuk didalamnya upaya mewujudkan gagasan-gagasan baru atau inovasi sebagai segi positif dari kebiasaan masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

Pengelolaan pembangunan desa pada akhirnya menuntut pendekatan secara holistik, apalagi pembangunan desa sekarang ini, dalam tataran geraknya mencakup juga berbagai aspek kehidupan sejak dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta idiologi.

Unsur yang merupakan karakteristik dari sebuah Desa :

1. Penduduk Desa

Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.

2. Daerah atau Wilayah Desa

Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.

3. Pemimpin Desa

Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya.

4. Urusan atau Rumah Tangga Desa

Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku.

Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya PP No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat. Pengertian pembangunan yang sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.Pembangunan dalam Paradigma bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah desa yang maju.

Selanjutnya tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan

direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

B. Tugas penghulu Desa Sebagai Pemimpin

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang diserahi tugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin.

Penghulu desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, Kepenghuluan Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.
2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.

3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepenghuluan Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasilais sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil tertentu. Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepenghuluan Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

Secara universal penghulu desa sejauh ini belum begitu mampu mengimplementasikan fungsinya dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Fungsikepala desa amat luas, sehingga menjalankan fungsinya tersebut dibantu oleh prangkat desa, yang meliputi kaur-kaur sebagai unsur pelaksana dan unsur pembantu, untuk itulah penghulu desa

harus mampu memberikan fungsinya mengarahkan semua unsur yang ada baik kaur pelaksana dan pembantu melancarkan proses pelayanan umum berjalan berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini terlihat dari prangkat pelayanan belum lengkapdiisi oleh penghulu desa maupun prangkat-prangkatnya, belum tertatanya administrasi secara umum, buku registrasi yang belum lengkap, data kependudukan yang tidak beraturan, hasilnya apa bila masyarakat ingin berurusan administrasi akan memakan waktu lama dan lambat.

Melihat kondisi administrasi yang demikian menunjukkan belum maksimal fungsi penghulu desa, padahal menurut pandangan fungsi-fungsi administrasi itu antara lain:

- a. Perencanaan (Planning)
- b. Pengorganisasian (Organizing)
- c. Pengkoordinasian (Coordinating)
- d. Komunikasi
- e. Supervisi
- f. Kepegawaian (Stafling)
- g. Pembiayaan (Budgeting)
- h. Penilaian (Evaluating)⁵

Halinilah merupakan hakekat manajemen, aktivitas yang menjadi pusat administrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa perlu diingat bahwa tatanan administrasi yang berada dipedesaan dewasa ini

⁵M. Ngalim Purwanto, administrasi dan supervisi pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990).h.15.

masih cukup memprihatikan, apalagi sebagian prangkat desanya masih baru. Untuk itu penghulu desa sebagai pemimpin di daerah pemerintahan harus memiliki kepemimpinan, tanpa adanya tersebut proses dalam fungsi penghulu desa kurang mampu berjalan sebagai mana yang diharapkan. Disamping sifat-sifat dasar yang dimiliki seorang pemimpin harus pula didasarkan dengan keahlian dalam bidang pekerjaan yang dipimpinnya, keahlian jabatan merupakan syarat umum dalam kepemimpinan, tanpa keahlian tidak akan mungkin menjadi pemimpin, bukan pula keahlian jabatan pula tetapi juga pengalaman dan penguasaan semua macam pengetahuan, keahlian dan pengetahuan yang dimaksud disini latar belakang pendidikan yang dimilikinya.⁶

Konsekuensi bila pemimpin kurang mampu menjalankan fungsinya dengan baik., maka pelayanan administrasi tidak mampu dilakukan sempurna, hal ini sangat besar kaitannya dengan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan lembaga yang dipimpinnya, secara lebih konkrit faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin antara lain:

1. Keahlian dan pengaruh yang dimilikinya.
2. Jenis pekerjaan atau lembaga yang dipimpin.
3. Sifat-sifat kepribadian pemimpin.
4. Sifat-sifat kepribadian yang mengikut.
5. Sangsi-sangsi yang ada ditangan pemimpin.

⁶*ibid*

Dalam hal fungsi penghulu desa sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh seorang penghulu desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Fungsi penghulu desa sebagai perantara meliputi beberapa aspek diantaranya:

1. Penghulu desa harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik.
2. penghulu desa harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan/konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Dengan adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa, maka seorang penghulu desa harus bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan penghulu desa harus berlaku adil, tidak boleh melihat dan menilai seseorang berdasarkan status sosial. Azas keadilan perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.

C. Standar pelayanan desa

Pelayanan umum oleh pemerintah desa tidak dapat dipungkiri bahwa prosesnya masih belum maksimal, pada hal target diharuskan adalah bagaimana masyarakat merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima. Oleh karena

itu setiap aparatur desa berkewajiban untuk berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pemerintah desa sebagai pelaku pelayanan masyarakat sangat perlu memberikan kesan keluar dari otoritas kekuasaan yang selalu menempatkan dibalik kewenangan-kewenangan yang ditopang oleh adanya dukungan aspek yang melalui peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelayanan, yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan bersifat abstrak, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.
3. Produksi dan konsumen dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadian tersebut bersamaan dan terjadi ditempat yang sama.⁷

Yang dimaksud dengan pelayanan umum (publik) adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat dan daerah, dalam berbentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa fisik, non fisik maupun administrasi.

⁷Panji Aritonga, *psikologi kepemimpinan*, (bandung reneka cipta, 1990), h. 60

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah desa wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan, standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji yang dapat dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

Oleh karena itu pelaksanaan yang berhubungan dengan pelayanan administrasi, perlu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, sementara untuk mencapai administrasi yang baik sudah tentu dibutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Implikasi dalam pencapaian pembangunan masyarakat desa hendaknya kepenghuluan desa memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol memenuhi syarat-syarat yang dapat diandalkan kemampuannya.

Untuk itu kepala Desa mempunyai Wewenang diantaranya :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun yang menjadi Kewajiban Kepala Desa Menjalankan Tugasnya

Pada pasal 15 dijelaskan bahwa Kewajiban Kepala Desa diantaranya adalah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sedangkan Untuk Hak Kepala Desa Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan pencalonan pengangkatan/pemberhentian Perangkat Desa kepada Pejabat yang berwenang mengangkat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan

4. Mengatur tata tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
5. Mewakili Desanya dalam rangka kerja sama dengan Desa atau Kelurahan lain.

D. Sturuktur Pemerintah Desa

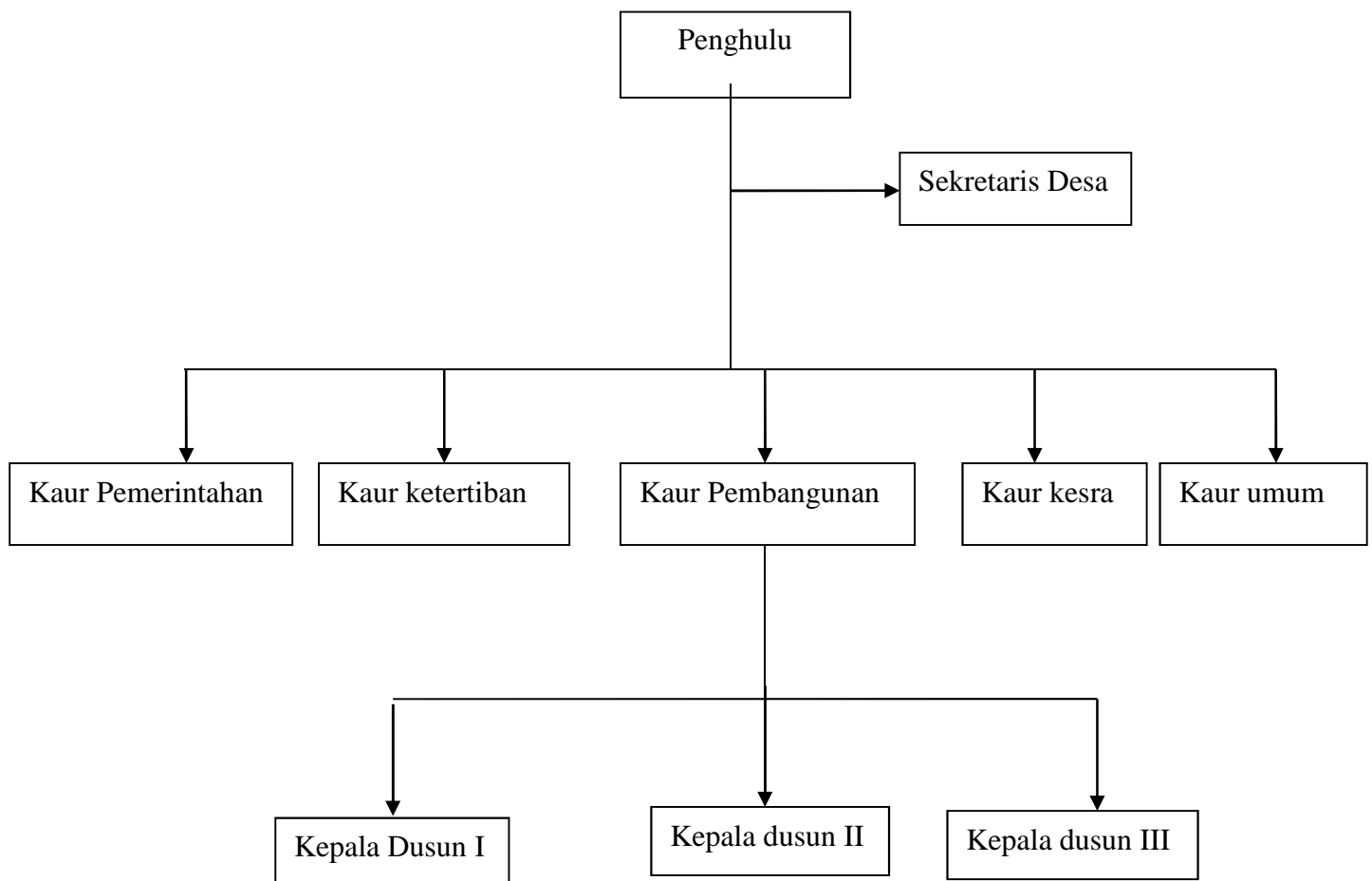
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya kemasyarakatan politik dan pemerintahan diindonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Sturuktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi intitusi sosial ynag mempunyai posisi yang sangat penting, desa merupakan intitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya serta relatif mandiri. Hal ini antara lain dilanjutkan dengan tingkat keagamaan yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.

Pada prisipnya atau sturuktur pemerintahan desa telah ditetapkan dalaam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintshn Daerah Pasal 202 ayat (1) menyebutkan, pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, ayat (2) perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, perangkat desa dan lainnya. Dan selanjutnya untuk kesempurnaan telah diberikan kewenangan dalam peraturan pemerintah pasal 208⁸. Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sampai saat ini sturuktur pemerintahan desa didesa kepenghuluan kota parit, perangkat desa terdiri dari staf yakni

⁸Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pemerintahan daerah.

sekretaris desa, kaur-kaur dan kepala dusun, untuk lebih jelas dapat dilihat pada sketsa berikut:

Bagan sturuktur pemerintah desa kota parit



E. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui serangkaian upaya yang berkesinambungan, meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara Republik Indonesia sebagai

negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah desa kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara prinsip tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta peningkatan peran serta masyarakat secara aktif disegala tingkatan dan disegala aspek.⁹

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dengan kata lain menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Namun demikian tidak boleh mengabaikan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu:

⁹Subrata winarta surya adi, otonomi daerah di era reformasi.h.47

- a. Adanya kesiapan sumberdaya manusia aparat yang berkeahlian
- b. Adanya sumberdana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan.
- c. Tersedianya pasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.
- d. Bahwa otonomi daerah yang ditetapkan adalah otonomi daerah dalam koridor negara kesatuan republik Indonesia.¹⁰

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah yang terdiri dari daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenanagan lintas kabupaten atau kota dan kewenanagan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Kewenangan untuk daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang politik, luar negeri, pertahanan keaamanan, peradilan, moneter, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang ditetapkan oleh praturan pemerintah. Disamping itu keleluasan otonomi yang mencakup pula dengan kewenangan yang utuh dan bulat dalam menyelenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.¹¹ Otonomi nyata dalam artian bahwa otonomi pemberian kepada daerah haruslah berdasarkan faktor-faktor, kepentingan-kepentingan dan tidakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang

¹⁰ibit

¹¹Bagir manan, menyongsong fajar otonomi daerah (yogyakarta: pusat studi hukum).h.37

benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata maupun mengurus rumahnya tangganya sendiri.

F. Pembangunan Desa Sebagai Kegiatan Pemerintah Desa

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini bukan dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, akan tetapi lebih jauh dari itu, desa dan masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan sasaran pokok pembangunan Nasional.

Dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan dalam Wilayah pembangunan masyarakat desa atau khususnya Pemerintah Republik Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan pada peningkatan, kesempatan perluasan kerja, pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesaan dan perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan di pedesaan dan perhatian yang melalui peningkatan prasarana dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sudut pandang dapat digunakan

untuk menelaah pembangunan pedesaan. ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. isi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2. Menj amin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (memanage) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa. Berikut pengertian tentang desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan desa Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta

memiliki batas yang jelas.¹² Dan ada juga yang mengemukakan bahwa: “Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”. mengemukakan bahwa: “Desa ialah sebagai suatu Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang yang tinggi/menetap disuatu Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu kepala desa”¹³. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa : “yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004)”¹⁴.

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

¹² Soetardjo, Soetadjo Kartohadikoesoemo, Cetakan Pertama, 2004. *Desa*, PN. Balai Pustaka, Jakarta. 2004:15, Yuliati, 2003:24).

¹³ Menurut B.N Marbun B.N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadikelurahan. Kewenangan desa adalah: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.